

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harsono, Boedi. (2005). *Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hernoko, Agus Yudha. (2008). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Mediatama.
- Hernoko, Agus Yudha. (2014). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Cet. 4)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kansil, CST. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khairandy, Ridwan. (2004). *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: UI Press.
- Khairandy, Ridwan. (2017). *Iktikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Margono, Suyud. (2000). *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Murdiyanto, Eko. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal). Yogyakarta: UPN 'Veteran' Press.
- Murad, Rusmadi. (1991). Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah. Jakarta: Alumni.
- Nurlinda, Ida. (2009). Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Parlindungan, AP. (2002). Pendaftaran Tanah Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Rahman, Sufirman & Abbas, Illham. (2023). Hukum Dalam Jual Beli Tanah. Aceh: Sefa Media Utama.
- Rasjidi, Lili & Putra, LB Wysa. (1993). Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rato, Dominikus. (2010). Filsafat Hukum: Mencari, Memahami dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Santoso, Lukman. (2016). Hukum Perikatan. Malang: Setara Press.
- Santoso, Lukman. (2019). Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Santoso, Urip. (2013). Hukum Agraria. Jakarta: Kencana.
- Sarjita. (2005). Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.

- Sjahdeini, Sultan Remy. (1993). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soemin, Soedharyo. (2004). Status Hak dan Pembebasan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetami, A. Siti. (2007). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Subekti, R. (2014). Aneka Perjanjian. Bandung: PT Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2015). Aneka Perjanjian. Bandung: PT Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. (2005). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. (2010). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. (2014). Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrani, Riduan. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Usman, Rachmadi. (2003). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Widodo, Dwi Putro, Zuhairi, Ahmad, Salam, Syukron, & Lubis, Elizabeth Lestari Taruli. (2016). Penjelasan Hukum: Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah. Jakarta: LeIP.
- Wijaya, Gunawan. (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Journal:

- Alwi, Irma Fithra. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli yang Beritikad Baik dalam Kaitannya dengan Akta Jual Beli yang Dibatalkan. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(2), hlm. 209–210.
- Danastri, Avitya. (2020). Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual yang Mengandung Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 30/PDT/2019/PT.DPS). *Jurnal Indonesian Notary*, 2(4), hlm. 89.
- Danastri, Avitya & Rusyad, Aad Nurdin. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik atas Jual Beli Hak Atas Tanah. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(7), hlm. 1651.
- Hermawan, Putri Kalingga & Putra, Mohamad Fajri Mekka. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli yang Beritikad Baik Terhadap Jual Beli Hak Atas Tanah yang Dilakukan Dibawah Tangan. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(1), hlm. 443–444.
- Ikhwan, Mufarrijul, dkk. (2022). Prinsip Itikad Baik Dalam Rechtsverwerking Pada Hukum Agraria Indonesia. Universitas Trunojoyo Madura, hlm. 191.
- Innaka, Antari, Rusdiana, Sa'ida, & Sularto. (2012). Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(3). Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Loi, Vanessa. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli yang Beritikad Baik yang Perbuatan Jual Beli Tanah dibatalkan Oleh Putusan Mahkamah Agung. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. xi.

- Maulida, Rizky. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli yang Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah. Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, hlm. xiii.
- Rajagukguk, Erman. (2000). Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan. Jurnal Magister Hukum, 2(4), PPs UII, hlm. 7.
- Rizky, Maulida. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli yang Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah. Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram.
- Rusyd, Aad Nurdin & Danastri, Avitya. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik atas Jual Beli Hak Atas Tanah. Jurnal Kertha Semaya, 10(7), hlm. 1651.
- Syahfitri, T. & Wandu. (2018). Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata. Jurnal Hukum Das Sollen, hlm. 2.
- Wijaya, Gede Krisna Wahyu & Dananjaya, Nyoman Satyayudha. (2018). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online. Jurnal Kertha Semaya, 6(8), hlm. 7.

Tesis:

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Syarat Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Karena Jual Beli.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1980. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 K/Sip/1980.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2016. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Internet:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>, terakhir diakses pada Tanggal 25 November 2024 Pukul 17.43 WIB.

Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum (7 Agustus 2024).

<https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/> (diakses 18 April 2025).

Zulkarnain, Handi. Syarat Sahnya Perjanjian Kontrak.

<http://rechthan.blogspot.co.id> (diakses 27 Januari 2025).

Zrlawfirm. (2024, 17 Oktober). Perjanjian Dengan Itikad Buruk Merupakan

Tindak Pidana Penipuan. <https://zrlawfirm.org/perjanjian-dengan-itikad-buruk-merupakan-tindak-pidana-penipuan/> (diakses 17 April 2025)

